

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian penulisan skripsi berjudul “Keterlibatan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Muslim Moro Di Filipina 1971-1996 ”. Simpulan ini merupakan jawaban atau sintesa dari rumusan masalah yang peneliti ajukan yaitu latar belakang dibentuknya Moro Nationalism Liberation Front pada tahun 1971, peranan Nur Misuari dalam membangun MNLF menjadi front yang berpengaruh di Filipina, dampak perjuangan MNLF terhadap perjuangan kemerdekaan Muslim Moro. Dalam penulisan ini juga terdapat rekomendasi penelitian yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam penelitian dan untuk masyarakat umum yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan judul penelitian ini.

5.1 Simpulan

Pertama, Filipina merupakan negara bekas jajahan bangsa Spanyol yang menjadi rumah bagi sebagian minoritas muslim yang terdapat di negara tersebut yang kebanyakan didominasi oleh non muslim seperti Kristen. Kondisi kehidupan sosial dan politik Bangsamoro di Filipina mengalami tindakan diskriminatif dari pemerintahan rezim Ferdinand Edralin Marcos yang mulai berkuasa sejak tahun 1965. Sebagai presiden di Filipina, Ferdinand Marcos memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan sistem pemerintahan termasuk menentukan kebijakan-kebijakan yang ada pada negara. Namun seiring berjalannya waktu, tindakan diskriminasi juga mulai ditampilkan oleh rezim Ferdinand Marcos terhadap masyarakat minoritas Bangsamoro yang dianggap benalu di Filipina. Banyak kebijakan yang cenderung bersifat diskriminatif terhadap Bangsamoro khususnya yang dilakukan selama masa pemerintahan baik dalam kehidupan sosial maupun politik, mulai dari upaya penggusuran, jaminan kesehatan dan pendidikan. Menutup ruang-ruang publik membuat masyarakat

Moro tidak dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan tidak dapat menyalurkan aspirasinya secara bebas. Sikap otoriter pemerintah tersebut diperparah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terkait HAM. Meskipun Filipina negara kaya kepulauan dengan pembangunan cukup baik, namun terdapat kesenjangan sosial antara masyarakat muslim dengan golongan elit. Kondisi tersebut disebabkan oleh tindakan korupsi golongan elit yang menambah keterpurukan kondisi sosial ekonomi pada saat kepemimpinan Ferdinand Marcos atau sebelum terjadinya penurunan kekuasaan 1986. Ketimpangan sosial dan politik terjadi cukup parah terutama menjelang akhir pemerintahan Ferdinand Marcos tersebut, yang kemudian mendorong rakyat untuk bergerak melakukan perlawanan agar menciptakan perubahan-perubahan yang setidaknya dapat membuat keadaan menjadi lebih baik dan menjalankan kehidupan lebih demokratis. Puncak kekecewaan dengan kondisi tersebut menyebabkan munculnya sebuah gerakan perlawanan dari Bangsamoro yang menuntut rezim Ferdinand Marcos untuk lengser dari jabatan pemimpin dalam pemerintahan Filipina.

Kedua, dalam mewujudkan terjadinya sebuah perubahan yang diinginkan Bangsamoro, kemudian dibentuklah sebuah kelompok perlawanan yang bernama *Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)* atau biasa disebut sebagai front pembebasan muslim Moro sebagai bentuk tanggapan terhadap manifestasi historis dan ketimpangan sosial-politik terhadap minoritas Muslim di Filipina. Gerakan rakyat (*People Power*) merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh Bangsamoro, dengan melakukan aksi protes yang diketuai langsung oleh Nur Misuari dalam menyerukan perubahan dalam berbagai aspek, diantaranya mengembalikan hak sebagai warga negara dan menuntut pelengseran Ferdinand Marcos dari kepemimpinan Filipina. Bentuk diskriminatif kehidupan muslim Filipina dianggap sebagai sebuah masalah besar selain itu tidak menadapat perubahan yang signifikan atas kebijakan-kebijakan yang ada, menjadikan fokus utama muslim Moro dan berbagai kalangan menyatukan kekuatan untuk mengekspresikan rasa kekecewaan yang memuncak. *MNLF* sangat berperan dalam gerakan perlawanan di Filipina sejak tahun 1971. Gerakan perlawanan yang dilakukan Bangsamoro tidak hanya dilatarbelakangi kepentingan salah satu pihak saja, melainkan mewujudkan perubahan secara menyeluruh dalam tubuh

pemerintahan Filipina dan mengakhiri tindakan diskriminatif terhadap kaum muslim di Filipina Selatan.

Ketiga, Front pembebasan Muslim Moro (*MNLF*) sendiri dianggap oleh pemerintah Filipina sebagai kelompok pemberontak yang disebut akan sangat sulit berkembang, akan tetapi karena perjuangan yang dilakukan *MNLF* sendiri cukup besar sehingga dapat membuka mata dunia bahwa *MNLF* merupakan kelompok yang beridealisme islam dan sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara islam lainnya, terbukti dalam organisasi konferensi Islam yang berpusat di Libya diman OKI memberikan dukungan penuh baik dari segi materi maupun material. Sedangkan untuk Negara-negara Islam, *MNLF* mendapat bantuan dari negara Malaysia, Indonesia, Libya dan lain-lain. *MNLF* yang diketuai oleh Nur Misuari dan Hasim Selamat sebagai wakil menginginkan pemerintahan Filipina segera menandatangani perundingan perdamaian pertama pada tahun 1976 atau lebih dikenalnya dengan Perjanjian Tripoli 1976 yang diselenggarakan di Libya. Di dalam perjanjian itu di sepakati jika terdapat 13 wilayah masuk kedalam otonomi Filipina Selatan tapi belum membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan pada tujuan utama di selenggarakannya perjanjian tersebut. Dinamika gerakan pembebasan *MNLF* selanjutnya terjadi pasca pelaksanaan perjanjian perdamaian di Tripoli pada tahun 1976, dimana wakil dari *MNLF* yaitu Hasim Selamat keluar dari *MNLF* karena merasa kecewa terhadap ideologi yang pemikiran *MNLF* kemudian mendirikan kelompok baru yang bernama *MILF* (*Moro National Liberation Front*), tidak berselang lama salah satu dari anggota *MNLF* yang bernama Abdul Rajak mendirikan *Abu Syyaf Group* yang memiliki cara gerakannya dengan melakukan penyanderaan dan lebih bersifat kelompok sparatis yang sangat berbeda haluan dengan ideologi *MNLF* dan *MILF*.

Keempat, Munculnya kebijakan yang di canangkan oleh Ferdinand Marcos membuat konflik antara umat islam dan non muslim yang mengatasnamakan Ilaga semakin meluas dan membesar. Di sisi lain *MNLF* berhasil menggalang dukungan dari para pemimpin Islam, seperti Muammar Kadaffi dari Libya dan Tun Mustafa Harun Menteri kepala Sabah, Malaysia sebagai bentuk dukungan dalam melawan kelompok non muslim yang dikomadoi oleh pemerintahan Filipina. *MNLF* berhasil meningkatkan peperangan selama 1973-1976 yang memaksa pemerintah

Filipina untuk menandatangani perjanjian perdamaian yang mengharuskan pemerintah Filipina memberikan otonomi penuh bagi daerah Moro. Namun alih-alih mendapatkan semua itu terjadi sebuah tekanan yang didapatkan Muslim Moro semakin terasa hebat, terjadilah sebuah peristiwa yang merupakan sebuah gerakan lanjutan Bangsamoro dalam mewujudkan kemerdekaan, meskipun perlawanan tersebut mendapatkan tindakan diskriminatif dari aparat pemerintah bahkan menelan banyak korban. Kemunculan konflik bersenjata ini disebabkan dua kepentingan berbeda dan saling bertentangan. Pertempuran antara pemerintahan Ferdinand Marcos yang berupaya menggusur umat muslim dari Filipina, Pertempuran-pertempuran itu muncul di seluruh wilayah Filipina Selatan hingga menyebabkan banyak jatuhnya korban di kedua belah pihak.

Kelima, Dampak dari bentuk perlawanan Bangsamoro bersama *MNLF* terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintahan Ferdinand Marcos sangat besar bagi kehidupan masyarakat Muslim Moro terutama dalam kehidupan sosial dan politik. Kejatuhan rezim Ferdinand Marcos tentunya memberikan sebuah peluang besar bagi pemerintahan baru dalam mewujudkan harapan-harapan yang dibawa masyarakat minoritas saat upaya pergerakan perlawanan. Tindakan diskriminasi terhadap rakyat yang selama ini terkekang nampaknya dapat dirasakan kembali oleh Bangsamoro yang dapat memperjuangkan dan memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara minoritas di Filipina. Pada akhirnya terciptanya perjanjian perdamaian atau yang disebut (*Final Peace Agreement*) 2 September 1996 antara *MNLF* dan pemerintahan Filipina merupakan langkah akhir yang ditempuh, meskipun pada dasarnya upaya perdamaian sudah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya Perjanjian Tripoli di Libya pada tahun 1976. Atas dasar upaya memerdekakan Bangsamoro, negara-negara yang terbentuk di bawah OKI ikut serta dalam upaya terciptanya perdamaian. Dibentuklah *SZOPAD* (*Special Zone for Peace and Development*) yang meliputi wilayah yang diklaim *MNLF*. Selain itu, dibentuk dua institusi untuk memfasilitasi penguatan terhadap *SZOPAD*, yaitu *SPCPD* (*Southern Philippines Council for Peace and Development*) dan *CA* (*Consultative Assembly*) bertugas selama tiga tahun untuk memperkuat wilayah-wilayah tersebut untuk kemudian memiliki otonomi kemandirian politik regional dengan kekuasaan yang

lebih besar dan cakupan wilayah lebih besar dan cakupan dari yang ada di dalam eksistensi ketika itu.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan *Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)* dalam perjuangan kemerdekaan muslim Moro, Menjelang akhir pemerintahan Marcos, Terjadinya konflik internal antara Ferdinand Edralin Marcos dan Amerika Serikat mengakibatkan kemerosotan kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam upaya mengintervensi kedudukan terutama dalam bidang politik dan militer berdampak cukup tajam. Mengakibatkan Marcos tidak memiliki kekuatan dan mengharuskannya lengser dari jabatannya di tambah menguatnya partai dari Corazon Aquino. Selain itu peranan yang diberikan *MNLF* dalam gerakan perlawanan yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada umat Islam Filipina agar mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima. Peranan umat Islam dan *MNLF* sangat berpengaruh untuk melawan ketidakadilan sistem pemerintahan. kedua upaya yang dilakukan tersebut menjadi langkah yang efektif dalam menyurakan aksi. Kehadiran *MNLF* yang muncul di Filipina dengan kepentingan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Moro memberikan pengaruh bagi mereka.

Dampak yang ditimbulkan dari pergerakan perlawanan yang dilakukan *MNLF* sangat besar bagi kehidupan Bangsa Moro. Bentuk upaya perdamaian yang diinginkan umat muslim di Filipina tercapai meskipun sulit terealisasi. Memperoleh kemerdekaan adalah hak bagi setiap warga negara dan itu merupakan tugas pemerintah bagaimana menjaga keutuhan Filipina agar tetap bersatu. Permasalahan sosial, keamanan dan perastuan, menjadi masalah utama yang perlu segera diselesaikan agar menjadi negara Filipina aman dan damai.

5.3 Rekomendasi

Penelitian skripsi berjudul “Keterlibatan *Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)* Dalam Perjuangan Kemerdekaan Muslim Moro Di Filipina 1971-1996” merupakan peristiwa sejarah kontemporer. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pembaca tentang kajian sejarah yang

berkaitan dengan sejarah kawasan Asia Tenggara khususnya Filipina. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi Departemen Pendidikan Sejarah UPI, dengan harapan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperkaya informasi serta menjadi bahan diskusi mengenai konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya *Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)*.

Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menambah informasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam pelajaran Sejarah Peminatan SMA/MA/SMK yang tercantum pada Kompetensi Dasar 3.6 : Menganalisis konflik-konflik di Timur-Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika dan Amerika Latin dan Kompetensi Dasar 4.6 : Menyajikan hasil analisis tentang konflik-konflik Timur-Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika dan Amerika Latin dalam bentuk tulisan dan/atau media lain. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengkaji sebuah upaya penyelesaian sebuah konflik antara individu maupun kelompok. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait *Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)* di Filipina.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti yang lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya baik yang memiliki judul sama atau kajian masalah yang memiliki keterkaitan dalam pembahasan. Semoga penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan penjelasan khususnya mengenai Arab Spring yang terjadi di Libya sehingga dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Penulis merasa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berharap penelitian selanjutnya baik yang memiliki bahasan serupa atau memiliki topik kajian yang berkaitan, agar menggali informasi yang belum tersampaikan dalam penelitian ini.